

DAMPAK PROGRAM BANTUAN SOSIAL COVID-19 TERHADAP KERAWANAN PANGAN DI INDONESIA

Abstract

This study examines the effects of social protection programs on household food insecurity, taking Indonesia as a case study. Utilizing longitudinal data from the World Bank's survey on the socioeconomic impacts of COVID-19 on households, we employ a fixed effects model to estimate the causal impact. In identification, we compare the food insecurity status of households that received the social protection programs during the pandemic with those that did not. The findings indicate that recipients of unconditional cash transfer experienced a lower risk of food insecurity. However, households receiving electricity subsidy assistance tend to experience a higher probability of food insecurity. This finding suggests that unconditional cash transfers may be more effective in supporting household food access during crisis events such as the COVID-19 pandemic.

Gedung EKP, Prodi Ekonomi Pembangunan
FEB USK
Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111
Telp/Fax: (0651) 7551265
Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id

©2025 FEB USK. All rights reserved.

M As'ad Fathin Naufal Siregar 1

Peneliti Independen, Banda Aceh

Riswandi Riswandi 2*

*Universitas Syiah Kuala
Email: riswandi@usk.ac.id*

Keywords:

***Food insecurity, COVID-19 pandemic,
social protection programs, Indonesia***

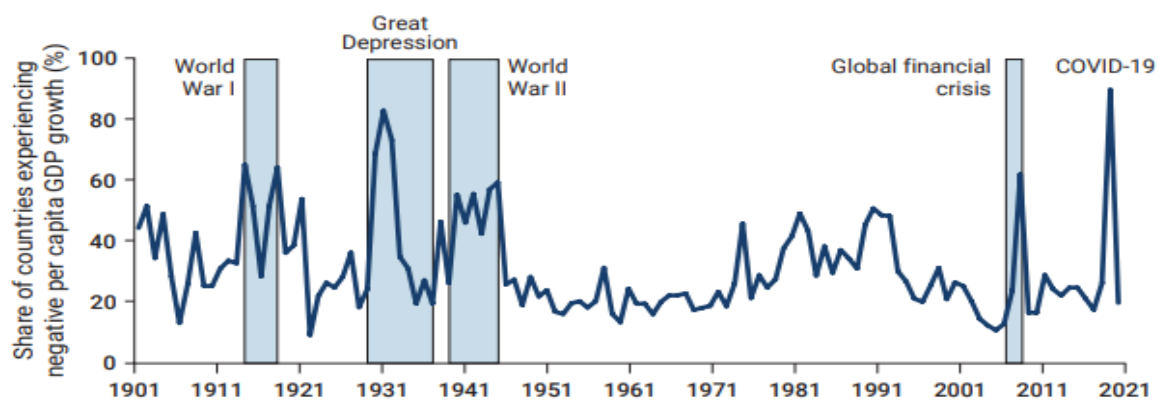
INFORMASI ARTIKEL

*Dikirim: 20 Maret 2025
Diterima setelah revisi: 10 April 2025
Diterima: Mei 2025
Dipublikasi: Mei 2025*

*Riswandi adalah corresponding author

1. Pendahuluan

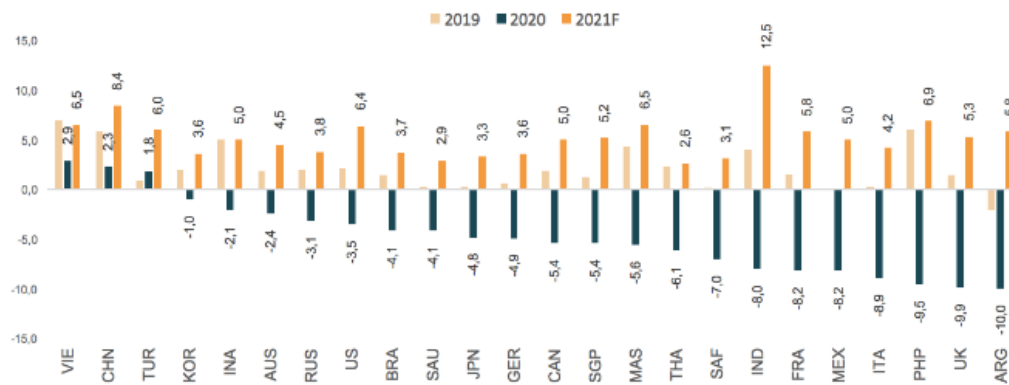
Pandemi COVID-19 berdampak buruk tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi, sosial, pangan, ketenagakerjaan, pendidikan dan multisektoral lainnya. Sampai dengan Desember 2022, total kasus dan total kematian pandemi COVID-19 secara global secara berturut-turut mencapai lebih dari 646 juta kasus dan 6,6 juta jiwa. Sementara itu di Indonesia, jumlah kasus dan kematian berturut-turut mencapai 6,7 juta kasus dan sekitar 160 ribu jiwa sampai dengan November 2022 (WHO, 2022). Pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Seperti ditampilkan pada Gambar 1, pertumbuhan ekonomi di lebih dari 80 persen total negara-negara di dunia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi tersebut. Kondisi ini lebih parah dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat perang dunia I dan II, depresi tahun 1930, dan krisis keuangan global 2007-2008.



Sumber: World Bank (2022)

Gambar 1: Tren pertumbuhan ekonomi dunia sejak 1901-2021

Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi secara signifikan di berbagai negara termasuk negara maju dan negara miskin serta berkembang, sebagaimana di tunjukkan pada Gambar 2. Tidak terkecuali, pertumbuhan ekonomi Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, juga mengalami kontraksi sebesar 2,1% pada tahun 2020. Pada periode yang sama, beberapa negara maju juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, antara lain Inggris (9,9%), Perancis (8,2), dan Italia (8,9) Sebaliknya, perekonomian Tiongkok dan Vietnam justru bertumbuh secara positif sebesar masing-masing 2,3% dan 2,9%. Bank dunia memprediksi pada tahun 2020 ekonomi global menyusut sekitar 3% dan kemiskinan global meningkat akibat pandemi COVID-19 (World Bank, 2020).



Sumber: IMF dan Kementerian Keuangan, 2021.

Gambar 2: Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara Maju dan ASEAN, Tahun 2019-2021

Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan pandemi COVID-19 menyebabkan kerawanan pangan yang cukup signifikan (Darma *et al*, 2021; Syafiq *et al.*, 2022; Aisyah, 2020; Irfansyah dan Rahmawati, 2021). Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap rantai pasokan pangan seperti ketersediaan, akses dan stabilitas pangan sehingga dapat memberikan ancaman serius pada rumah tangga miskin dan rentan akan kerawanan pangan (PBB, 2020). Rantai pasokan pangan terganggu dikarenakan kebijakan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19 dengan membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk mengatasi dampak buruk ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar melalui berbagai intervensi, termasuk pemberian berbagai bantuan sosial kepada masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan selama pandemi COVID-19.

Penelitian ini menginvestigasi dampak program-program bantuan sosial pemerintah yang diluncurkan selama pandemi COVID-19 terhadap kerawanan pangan. Penelitian ini penting dilakukan karena mengurangi kerawanan pangan merupakan indikator utama dalam pembangunan berkelanjutan 2030 (SDGs) yakni *zero hunger*. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan data survey longitudinal *World Bank* tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap sosioekonomi rumah tangga di Indonesia. Survey nasional ini relevan sebagai sumber data dalam penelitian ini karena menangkap beberapa informasi penting tentang ketahanan pangan dan bantuan sosial selama pandemi COVID-19.

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Kerawanan Pangan

Definisi

Kerawanan pangan didefinisikan sebagai keadaan ekonomi dan sosial rumah tangga yang terbatas atau tidak pasti aksesnya terhadap pangan yang cukup (OASH, 2020). Menurut FAO (2022), seseorang dikatakan mengalami kerawanan pangan ketika ia tidak memiliki akses yang teratur terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Dengan demikian, kerawanan pangan adalah kondisi ketika suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya akibat kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mendukung. Kondisi ini dapat bersifat sementara maupun jangka panjang. Menurut FAO, kerawanan pangan diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Kerawanan pangan sedang, yaitu kondisi ketika seseorang atau rumah tangga terpaksa mengurangi kualitas atau kuantitas makanan yang dikonsumsi karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya.
2. Kerawanan pangan berat, yaitu kondisi ketika seseorang atau rumah tangga kehabisan makanan dan tidak mampu memenuhinya akibat ketiadaan uang atau sumber daya lainnya, sehingga harus melewati satu atau beberapa hari tanpa makan.

Terdapat tiga aspek yang harus terpenuhi agar rumah tangga tidak termasuk kelompok rawan pangan. Pertama, ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang diperoleh dari produksi domestik, transaksi perdagangan internasional, serta bantuan pangan internasional. Kedua, keterjangkauan pangan yaitu keberadaan pangan secara fisik yang dapat dijangkau rumah tangga untuk memeprolehnya dengan kemampuan ekonominya. Terakhir, terdapat keberlangsungan pasokan dan stabilitas harga pangan yang terjangkau bagi rumah tangga.

Pengukuran

Indikator yang di gunakan dalam mengukur tingkat kerawanan pangan rumah tangga telah di perkenalkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam *Survey Module Food Insecurity Experience Scale* (FIES-SM). Metode ini telah diterapkan berbagai negara, termasuk Indonesia melalui BPS, yang melakukan pengukuran untuk melihat ketahanan pangan pada rumah

tangga. Modul Survei FIES terdiri dari delapan pertanyaan yang dapat digunakan dalam berbagai jenis survey kependudukan.

Pertanyaan dalam metode FIES mengacu pada pengalaman masing-masing responden atau rumah tangganya secara keseluruhan. Pertanyaan-pertanyaan ini berfokus pada perilaku dan pengalaman yang dilaporkan sendiri terkait dengan akses terhadap makanan, khususnya akibat meningkatnya kesulitan karena keterbatasan sumber daya dalam empat minggu terakhir. Tabel 1 berikut ini merangkum daftar pertanyaan dalam metode FIES, dengan pilihan jawaban “ya” atau “tidak”.

Tabel 1: Modul Metode FIES

No	Pertanyaan
1	Apakah Anda khawatir tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan?
2	Apakah Anda tidak dapat makan makanan yang sehat dan bergizi?
3	Apakah Anda hanya makan beberapa jenis makanan saja?
4	Apakah Anda harus melewatkan waktu makan?
5	Apakah Anda makan lebih sedikit dari yang seharusnya menurut Anda?
6	Apakah persediaan makanan di rumah tangga Anda habis?
7	Apakah Anda merasa lapar tetapi tidak makan?
8	Apakah Anda tidak makan sama sekali sepanjang hari?

Sumber: FAO 2021

2.2 Bantuan Sosial

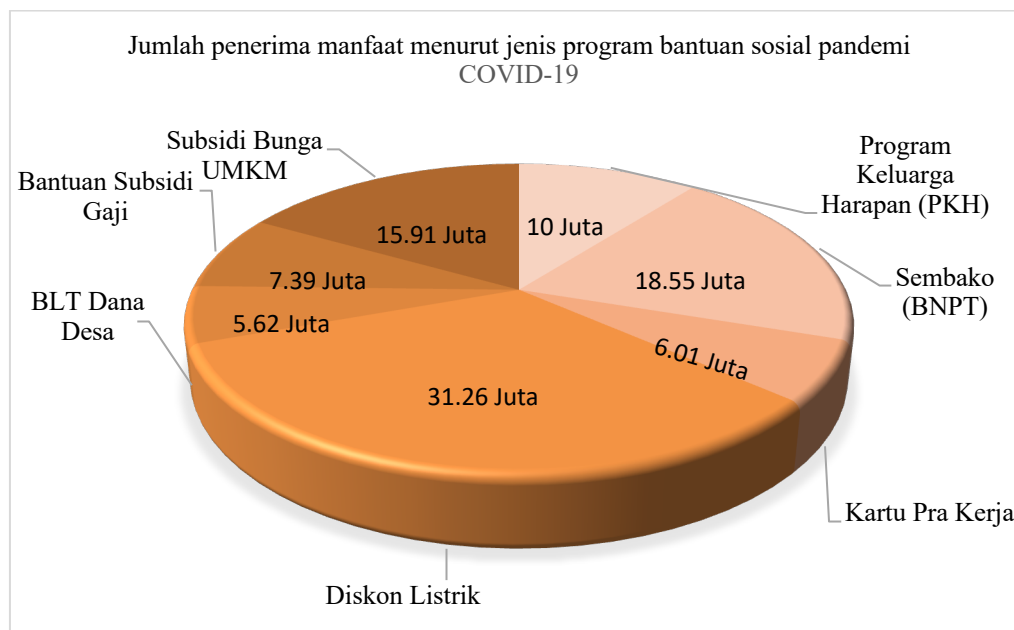
Bantuan sosial adalah bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah kepada kelompok sasaran, seperti individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Bantuan sosial bersifat sementara dan juga selektif, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial. Resiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menyebabkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat sebagai dampak terjadinya guncangan ekonomi, sosial, dan politik, serta bencana alam (Permendagri, No. 32 Tahun 2011).

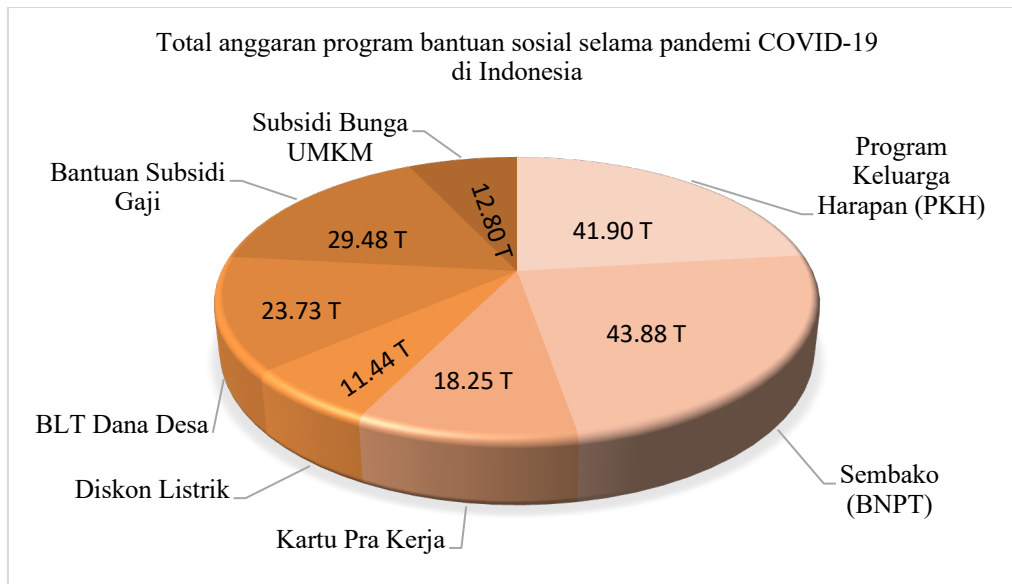
Bantuan sosial yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat merupakan upaya pemerintah memberikan perlindungan sosial serta jaminan sosial kepada rakyatnya agar mampu bertahan hidup secara wajar saat mengalami guncangan dan kerentanan

sosial. *Asian Development Bank* (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial adalah kebijakan dan program untuk menurunkan kemiskinan serta kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. ADB mengelompokkan perlindungan sosial dalam lima jenis, yaitu pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro dan berbasis wilayah untuk perlindungan bagi komunitas setempat, dan perlindungan anak (Rustanto, 2014).

2.3 Bantuan Sosial Pemerintah Pandemi COVID-19

Program bantuan sosial yang di rancang Pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 antara lain Bantuan Sosial Tunai/BST, Kartu Pra-kerja, Diskon Listrik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa/BLT DD, Bantuan Subsidi Upah/BSU, Subsidi Kuota Belajar, Bantuan Pelaku Usaha Mikro/BPUM dan subsidi bunga UMKM. Program bantuan BLT-DD dan Kartu Prakerja diberikan oleh pemerintah hingga tahun 2022, sedangkan bantuan sosial reguler seperti PKH dan Kartu Sembako tetap disalurkan. Gambar 3 menampilkan jumlah penerima manfaat program bantuan sosial dan anggaran yang dialokasikan untuk setiap jenis bantuan sosial.





Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020

Gambar 3: Jumlah Penerima dan Nilai Bantuan Sosial Pemerintah Indonesia Selama Pandemi COVID-19

2.4 Pandemi COVID-19 dan Kerawanan Pangan

Pandemi COVID-19 mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi melalui dua cara. Pertama, pandemi mengancam akses masyarakat terhadap pangan karena hilangnya pendapatan. Kedua, pandemi mengganggu sistem pasokan pangan (*food supply chain*). Kerawanan pangan sangat berhubungan dengan sektor pertanian karena peranannya yang penting dalam penyediaan dan perlindungan ketersediaan pangan. Apabila sektor ini mengalami guncangan akibat bencana alam ataupun bencana lainnya maka akan mempengaruhi sistem pangan dan memunculkan kekhawatiran rawan pangan. Sejalan dengan hal ini, penelitian Rozak *et al.* (2020) menyatakan bahwa petani menghadapi lebih banyak masalah selama pandemi ketika mereka gagal panen.

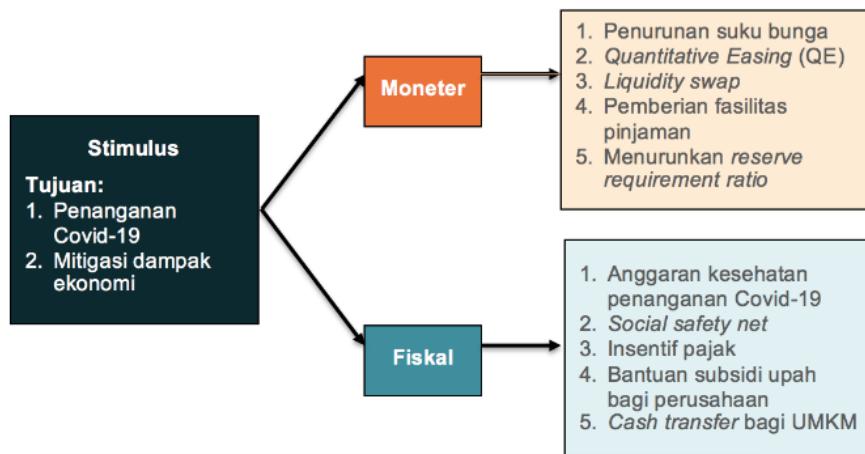
Selain itu, pandemi COVID-19 juga dapat mempengaruhi sektor pangan dan pertanian melalui berbagai mekanisme, termasuk diantaranya gangguan perdagangan internasional dan produksi dalam negeri. Sebagai akibatnya, gangguan di sektor pangan ini menimbulkan kerawanan pangan bagi masyarakat/rumah tangga (Schmidhuber *et al.* 2020).

Lembaga-lembaga internasional, seperti *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), *World Food Program* (WFP), dan *World Bank* (2020) mengeluarkan pernyataan bersama mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kerawanan pangan dan gizi serta menekankan perlunya koordinasi yang baik dalam menangani permasalahan pangan global ini di seluruh dunia. Survei yang dilakukan *Food and Agriculture Association* (FAO) menemukan bahwa pandemi

COVID-19 telah berkontribusi terhadap kenaikan revalensi kerawanan pangan global dari sekitar 25% di tahun 2019 menjadi 29,5% di tahun 2020.

2.5 Intervensi Pemerintah selama Pandemi COVID-19

Kebijakan pemerintah dengan memberikan perlindungan sosial seperti bantuan sosial merupakan salah satu internvesi yang tepat untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. IMF menawarkan instrument moneter dan fiskal untuk menangani dampak buruk pandemi COVID-19 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4. Instrumen moneter yang dapat dilakukan meliputi penurunan suku bunga, pemberian fasilitas pinjaman, dan penurunan giro wajib minimum. Sementara itu, beberapa kebijakan fiskal yang dapat diimplementasikan antara lain peningkatan anggaran kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif pajak, subsidi upah, dan bantual tunai untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.



Sumber: IMF diolah Kemenkeu 2020

Gambar 4: Konsep Kebijakan Pemerintah Menangani COVID-19

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh COVID-19 terhadap ketahanan pangan telah banyak diteliti sejak awal pandemi COVID-19 terjadi. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan dan sebagai akibatnya beberapa responden harus mengurangi pengeluaran untuk pangan (Aisyah, 2020; Irfansyah dan Rahmawati, 2021). Selain itu, Darma *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 secara signifikan berdampak buruk pada ketahanan pangan di Indonesia. Pandemi COVID dapat memperburuk ketahanan pangan, termasuk antara lain ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga pangan.

Beberapa kajian regional juga menemukan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan. Di Kota Langsa, Azharina *et al.* (2021) menemukan sekitar 48% dari total 436 responden rumah tangga mengalami kerawanan pangan dan ketidakcukupan gizi serta protein. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Purnasari *et al.* (2020) menemukan adanya kenaikan skala kelaparan dari sekitar 6% saat pra-pandemi COVID-19 menjadi 11% pada masa pandemi.

Penelitian yang dilakukan oleh Darma (2020) tentang manajemen ketahanan pangan Indonesia: strategi selama pandemi COVID-19. Metode yang digunakan yakni SCM (*Supply Chain Management*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa COVID-19 mengakibatkan ketersediaan pangan semakin memburuk, disertai dengan tingkat penularan yang cepat dan PHK karyawan di beberapa perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan PSBB mengakibatkan perlambatan transportasi, distribusi, dan pembatasan pergerakan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan Nilai Tukar Petani (NTP). Strategi yang ditawarkan pada penelitian ini yakni pemerintah harus dapat memastikan ketersediaan lima belas komoditas pangan dengan membangun *buffer stock* serta stabilitas harga, khususnya bagi petani.

Penelitian skala nasional juga telah dilakukan untuk menginvestigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan rumah tangga di perkotaan dan semi perkotaan (Syafiq *et al.*, 2022). Mereka menemukan bahwa selama pandemi rumah tangga dengan pendapatan lebih rendah memiliki risiko kerawanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi. Rumah tangga yang terkena dampak berat (melalui penurunan pendapatan dan berhenti bekerja) memiliki risiko 3 kali lebih tinggi untuk mengalami kerawanan pangan dibandingkan dengan mereka yang tidak. Sementara itu, Noerkaisar (2021) menemukan penyaluran bantuan sosial pemerintah masih belum efektif karena beberapa faktor, antara lain penerima bansos yang kurang tepat sasaran, distribusi dan waktu penyaluran bantuan, serta penyelewengan dana bantuan sosial. Nurhidayah dan Djalante (2022) menemukan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan kerawanan pangan terutama bagi masyarakat rentan dan miskin.

2.7 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa bantuan sosial pemerintah selama pandemi COVID-19 berhubungan negatif terhadap kerawanan pangan rumah tangga. Hubungan negatif ini dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga yang memperoleh bantuan sosial selama pandemi cenderung mengalami kerawanan pangan yang lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang tidak memperoleh bantuan sosial.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengkaji dampak program-program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 terhadap kerawanan pangan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini fokus pada tujuh jenis program bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, kartu sembako, subsidi listrik, Kartu Prakerja, subsidi bunga usaha mikro, kecil, dan menengah, dan subsidi upah.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari survey tentang dampak COVID-19 terhadap status sosial dan ekonomi rumah tangga yang dilakukan oleh Bank Dunia (*socioeconomic impact of COVID-19 on households*). Survei longitudinal secara nasional ini melalui wawancara berbasis telepon dengan durasi sekitar 15-20 menit untuk setiap responden rumah tangga. Data panel dari survey ini adalah data longitudinal di tingkat rumah tangga yang dilakukan sebanyak 7 gelombang survey dimulai pada bulan Mei 2020 untuk putaran pertama sampai dengan bulan April 2022 untuk putaran terakhir. Tabel 2 menunjukkan contoh beberapa variabel pertanyaan, gelombang survei, dan jumlah responden rumah tangga di setiap gelombang. Informasi yang dikumpulkan di setiap putaran survei berbeda-beda. Sebagai contoh, pertanyaan terkait jaring pengaman sosial di tanyakan pada gelombang 1,3,5 dan 6. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data panel keempat gelombang tersebut dengan jumlah responden sebanyak 3.379 rumah tangga panel.

Tabel 2: Informasi Survei

Variabel Pertanyaan	Ronde 1	Ronde 2	Ronde 3	Ronde 4	Ronde 5	Ronde 6	Ronde 7
Pengetahuan dan Perilaku							
Kehilangan Pekerjaan dan Pendapatan							
Ketahanan Pangan							
Akses ke layanan kesehatan							
Transaksi Digital							
Pendidikan							
Mekanisme Koping							
Kekhawatiran/Kesejahteraan Subyktif							
Jaring Pengaman Sosial							
Waktu Survei Awal	01/05/2020	26/05/2020	20/07/2020	03/11/2020	11/03/2020	18/10/2021	07/04/2022
Waktu Survei Akhir	17/05/2020	05/06/2020	02/08/2020	15/11/2020	24/03/2021	31/10/2021	20/04/2022
Jumlah Responden Rumah Tangga	4.338	4.119	4.067	3.953	3.686	3.471	3.434
Jumlah Rumah Tangga Dalam %	100%	95%	94%	91%	85%	80%	79%

Sumber: World Bank. Indonesia - High-Frequency Monitoring of COVID-19 Impacts (HIFY), Rounds 1-7 2020-2022 (diolah).

Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kerawanan pangan adalah variabel *dummy* yang didasarkan pada dua pertanyaan di dalam survei dengan nilai 1 jika rawan pangan atau 0 jika sebaliknya. Studi ini menggunakan dua ukuran kerawanan pangan. Pertama adalah kerawanan pangan 1 (FIS 1) yang didasarkan pada pertanyaan “Selama seminggu terakhir, apakah rumah tangga anda mengalami kekurangan makanan karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya”. Kedua adalah kerawanan pangan 2 (FIS 2) yang didasarkan pada pertanyaan “Selama seminggu terakhir, apakah anda/anggota rumah tangga anda makan lebih sedikit dari yang seharusnya karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya”.
- b) Variabel program bantuan sosial selama pandemi COVID-19 bernilai 1 jika rumah tangga memperoleh bantuan sosial dan 0 jika tidak menerima bantuan sosial.
- c) Jenis kelamin kepala rumah tangga bernilai 1 jika kepala rumah tangga adalah laki-laki dan 0 jika perempuan.
- d) Umur kepala rumah tangga adalah bernilai 1 jika kepala rumah tangga berumur 15-34 tahun, 2 (umur 34-54 tahun), dan 3 (umur >54 tahun).
- e) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga merupakan variabel kategori yang bernilai 0 jika berpendidikan SMP kebawah, 1 berpendidikan SMA, atau 2 berpendidikan perguruan tinggi.
- f) Jumlah anggota rumah tangga diukur dengan satuan jiwa.

Metode Analisis

Studi ini menggunakan model efek tetap (*fixed-effects model*) untuk menganalisis dampak program bantuan sosial pemerintah selama pandemi COVID-19 terhadap kerawanan pangan, dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$FIS_{it} = \sum_{j=1}^7 \beta_j SN_{ijt} + \alpha_1 GENDER_{it} + \alpha_2 AGE_{it} + \alpha_3 EDUC_{it} + \alpha_4 HH_{it} + \mu_i + \varepsilon_{ijt} \dots (1)$$

dimana *i* adalah rumah tangga; *j* adalah jenis bantuan sosial, dan *t* adalah putaran survey. FIS adalah variabel *dummy* kerawanan pangan, bernilai 1 jika rawan pangan dan 0 jika sebaliknya. SN adalah variabel *dummy jenis bantuan sosial* yang bernilai 1 jika menerima jenis bantuan sosial dan 0 jika tidak menerima. Kode variabel untuk masing-masing jenis bantuan sosial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: SN1 untuk Program Keluarga Harapan (PKH), SN2 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), SN3 untuk bantuan sosial berupa sembako, SN4 untuk subsidi listrik, SN5 untuk Kartu Prakerja, SN6 untuk subsidi bunga usaha mikro, kecil, dan menengah, dan SN7 untuk subsidi upah. GENDER adalah jenis kelamin kepala rumah tangga, bernilai 1 jika laki-laki atau 0 jika perempuan. AGE adalah umur kepala rumah tangga. EDUC adalah pendidikan

tertinggi kepala rumah tangga. HH adalah jumlah anggota keluarga. μ adalah faktor-faktor yang tidak teramati di tingkat rumah tangga yang relative tidak berubah sepanjang waktu yang dapat mempengaruhi kerawanan pangan rumah tangga. e adalah *error term*. β_j adalah koefisien estimasi yang mengukur dampak bantuan sosial j terhadap kerawanan pangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 3 menampilkan ringkasan statistik variabel penelitian ini. Sebanyak 7% rumah tangga mengalami kerawanan pangan 1 (FIS 1), dan sebanyak 9% rumah tangga mengalami kerawanan pangan 2 (FIS 2). Rumah tangga penerima bantuan sosial PKH (SN1) dan bantuan BLT (SN2) mencapai masing-masing sebesar 21% dan 18%. Sebanyak 42% rumah tangga adalah penerima bantuan sembako (SN3). Rumah tangga yang menerima bantuan sosial subsidi listrik (SN4) sebanyak 44% dan rumah tangga penerima bansos kartu pra kerja (SN5) sebanyak 3%. Sebanyak 7% rumah tangga menerima bantuan sosial subsidi bunga (SN6) dan sebanyak 1% rumah tangga penerima bansos subsidi upah (SN7). Sebanyak 88% kepala rumah tangga sampel adalah laki-laki. Mayoritas umur kepala rumah tangga berada dalam kategori 2 yakni antara 35-54 tahun. Selanjutnya pendidikan responden terbanyak adalah menyelesaikan pendidikan menengah pertama. Secara rata-rata, jumlah keluarga dalam sampel adalah 4 orang.

Tabel 3: Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Min	Max	N
FIS 1	0.07785	0.26795	0	1	13.500
FIS 2	0.09815	0.29753	0	1	13.500
SN1	0.21610	0.41160	0	1	13.489
SN2	0.17851	0.38296	0	1	13.495
SN3	0.42833	0.49485	0	1	13.499
SN4	0.44015	0.49642	0	1	13.441
SN5	0.03001	0.17062	0	1	13.496
SN6	0.07174	0.25807	0	1	13.493
SN7	0.01008	0.09988	0	1	13.497
GENDER	0.88356	0.32077	0	1	13.500
AGE	2.10074	0.60292	1	3	13.500
EDU	0.68548	0.73671	0	2	13.500
HH SIZE	4.32859	1.68271	1	15	13.500

Sumber: Hasil penelitian (2023). Catatan: FIS 1 adalah variabel kerawanan pangan 1 dan FIS 2 adalah kerawanan pangan 2. SN1 adalah bantuan sosial PKH-conditional cash transfer, SN2 adalah bantuan sosial BLT-unconditional cash transfer, SN3 adalah bantuan sosial kartu sembako, SN4 adalah bantuan sosial

subsidi listrik, SN5 adalah bantuan sosial kartu pra kerja, SN6 adalah bantuan sosial subsidi bunga, dan SN7 adalah bantuan sosial subsidi upah.

4.4.4 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Tabel 5 melaporkan estimasi Fixed Effect Model dengan kerawanan pangan 1 sebagai variabel dependen. Pada Kolom 2, jenis bantuan sosial bantuan tunai langsung berhubungan secara negatif dan signifikan secara statistik dengan kerawanan pangan. Temuan ini bermakna bahwa rumah tangga yang memperoleh bantuan tunai langsung selama pandemi COVID-19 memiliki tingkat kerawanan pangan yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga bukan penerima bantuan tunai langsung. Nilai koefisien sebesar 0,022 dapat ditafsirkan bahwa penerima bantuan tunai mengalami insiden kerawanan pangan yang lebih rendah sebesar 2,2 persen poin dibandingkan mereka yang tidak menerima bantuan sosial jenis ini. Pada Kolom 4, bantuan sosial dalam bentuk subsidi listrik mempunyai hubungan yang positif dan signifikan secara statistik, yang berarti bahwa rumah tangga yang memperoleh subsidi Listrik selama masa pandemi cenderung memiliki tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi sebesar 2,2 persen poin. Pada Kolom 8, kedua jenis bantuan sosial ini secara signifikan mempengaruhi status kerawanan pangan rumah tangga. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dasgupta dan Robinson (2022) bahwa bantuan sosial tunai lebih efektif dalam mengurangi kerawanan pangan di kalangan rumah tangga dari waktu ke waktu. Selanjutnya, hasil penelitian dari Amrullah *et.al* (2020) bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkontribusi pada ketahanan pangan rumah tangga yang menerimanya dan juga mengubah pola konsumsi rumah tangga menjadi konsumtif.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan dampak bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19 relatif stabil dengan menggunakan definisi kerawanan pangan 2. Tabel 5 melaporkan hasil estimasi fixed-effects model dengan variabel kerawanan pangan 2 sebagai variabel dependen. Temuan penelitian ini relevan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tiwari *et.al* (2016) menemukan bahwa bantuan tunai langsung dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas makanan. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa bantuan transfer tunai dapat mengurangi prevalensi kerawanan pangan. Selanjutnya, Wardani (2018) menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap ketahanan pangan dan gizi rumah tangga. Sementara itu, Rocha (2007) menemukan bahwa subsidi telah memperparah kerawanan pangan. Temuan ini mendukung teori "*perverse subsidies*" oleh Myers

dan Kent (2001) yang menyatakan bahwa subsidi telah menciptakan eksternalitas negatif yang signifikan.

Tabel 4: Dampak Bantuan Sosial terhadap Kerawanan Pangan 1 (FIS 1)

Variabel dependen adalah FIS 1 bernilai 1 jika rawan pangan atau 0 jika sebaliknya.								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SN1	0.007 (0.014)							0.007 (0.014)
SN2		-0.022** (0.007)						-0.021** (0.007)
SN3			0.002 (0.006)					0.001 (0.006)
SN4				0.022* (0.010)				0.021* (0.010)
SN5					-0.017 (0.012)			-0.015 (0.012)
SN6						0.016 (0.012)		0.017 (0.012)
SN7							0.017 (0.025)	0.016 (0.025)
SEX	0.069 (0.058)	0.067 (0.059)	0.070 (0.058)	0.070 (0.059)	0.069 (0.058)	0.070 (0.058)	0.070 (0.058)	0.068 (0.059)
AGE	-0.132 (0.084)	-0.131 (0.085)	-0.132 (0.084)	-0.132 (0.083)	-0.133 (0.084)	-0.131 (0.083)	-0.132 (0.083)	-0.129 (0.084)
EDU	0.066 (0.064)	0.064 (0.065)	0.065 (0.064)	0.068 (0.064)	0.066 (0.064)	0.066 (0.063)	0.066 (0.064)	0.068 (0.065)
HHSIZE	-0.002 (0.006)	-0.002 (0.006)	-0.003 (0.006)	-0.002 (0.006)	-0.002 (0.006)	-0.002 (0.006)	-0.003 (0.006)	-0.001 (0.006)
Obs	13489	13495	13499	13441	13496	13493	13497	13415
χ^2 -within	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003

Sumber : Hasil Penelitian (2023). Robust Standar errors dalam kurun. Catatan: FIS1 adalah variabel kerawanan pangan 1. SN1 adalah bantuan sosial PKH, SN2 adalah bantuan sosial BLT, SN3 adalah bantuan sosial kartu sembako, SN4 adalah bantuan sosial subsidi listrik, SN5 adalah bantuan sosial kartu pra kerja, SN6 adalah bantuan sosial subsidi bunga, dan SN7 adalah bantuan sosial subsidi upah. Kolom 1- 7 menyajikan hasil regresi untuk masing-masing jenis bantuan sosial sebagai variabel independen dan kerawanan pangan 1 (FIS 1) sebagai variabel dependen. Kolom 8 menyajikan hasil estimasi untuk ketujuh jenis bantuan sosial sebagai variabel bebas dan kerawanan pangan 1 (FIS 1) sebagai variabel dependen. *, **, *** menunjukkan signifikan pada tingkat signifikansi 10, 5 dan 1%.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa karakteristik individu kepala rumah tangga (kelamin, umur dan pendidikan) dan karakteristik rumah tangga (jumlah anggota keluarga) tidak memiliki hubunga dengan kerawanan pangan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sihite dan Tanziha (2021) bahwa jumlah keluarga dan tingkat pendidikan tidak menunjukan hubungan dengan kerawanan pangan rumah tangga. Selanjutnya, Wahyuni dan Sukarniati (2018) variabel jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Lalu, di pertegas dengan hasil penelitian Husaini (2012) menyatakan bahwa umur, pendidikan dan jumlah anggota keluarga tidak berkaitan dengan ketahanan pangan rumah tangga.

Saputro dan Fidayani (2020) juga menemukan bahwa jumlah anggota keluarga dan pendidikan tidak mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga

Tabel 5: Dampak Bantuan Sosial terhadap Kerawanan Pangan 2 (FIS 2)

Variabel dependen adalah FIS 2 bernilai 1 jika rawan pangan dan 0 sebaliknya.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SN1	0.001 (0.015)							0.000 (0.015)
SN2		-0.033*** (0.008)						-0.032*** (0.008)
SN3			-0.000 (0.007)					-0.002 (0.007)
SN4				0.029** (0.011)				0.029** (0.011)
SN5					-0.016 (0.013)			-0.013 (0.014)
SN6						-0.009 (0.014)		-0.009 (0.014)
SN7							0.016 (0.029)	0.016 (0.029)
SEX	0.014 (0.058)	0.010 (0.059)	0.014 (0.058)	0.015 (0.058)	0.013 (0.058)	0.014 (0.058)	0.014 (0.058)	0.010 (0.059)
AGE	-0.159 (0.087)	-0.157 (0.089)	-0.159 (0.087)	-0.158 (0.087)	-0.159 (0.087)	-0.160 (0.087)	-0.158 (0.087)	-0.157 (0.089)
EDU	0.001 (0.089)	0.002 (0.092)	0.001 (0.089)	0.005 (0.088)	0.001 (0.089)	0.001 (0.089)	0.001 (0.089)	0.003 (0.091)
HHSIZE	-0.003 (0.167)	-0.002 (0.007)	-0.003 (0.007)	-0.001 (0.006)	-0.002 (0.007)	-0.003 (0.007)	-0.003 (0.007)	-0.000 (0.006)
Obs	13493	13495	13499	13441	13496	13493	13497	13415
χ^2 -within	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.034

Sumber : Hasil Penelitian (2023). Robust Standar errors dalam kurun.

Catatan: FIS 2 adalah variabel kerawanan pangan 2. SN1 adalah bantuan sosial PKH, SN2 adalah bantuan sosial BLT, SN3 adalah bantuan sosial kartu sembako, SN4 adalah bantuan sosial subsidi listrik, SN5 adalah bantuan sosial kartu pra kerja, SN6 adalah bantuan sosial subsidi bunga, dan SN7 adalah bantuan sosial subsidi upah. Kolom 1- 7 menyajikan hasil regresi untuk masing-masing jenis bantuan sosial sebagai variabel independen dan kerawanan pangan 2 (FIS 2) sebagai variabel dependen. Kolom 8 menyajikan hasil estimasi untuk ketujuh jenis bantuan sosial sebagai variabel bebas dan kerawanan pangan 2 (FIS 2) sebagai variabel dependen. *, **, *** menunjukkan signifikan pada tingkat signifikansi 10, 5 dan 1%.

5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis dampak program bantuan sosial terhadap kerawanan pangan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa rumah tangga penerima bantuan sosial bantuan langsung tunai mempunyai resiko kerawanan pangan yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menerima bantuan tunai langsung. Selanjutnya, rumah tangga penerima subsidi listrik dalam masa pandemi justru mempunyai resiko kerawanan pangan yang lebih tinggi. Alasan yang mungkin adalah karena bantuan sosial dalam bentuk ini tidak dapat secara langsung dikonsumsi, dan nilai nomilanya juga relatif sangat kecil. Alasan lainnya, subsidi listrik hanya diberikan kepada rumah tangga yang memiliki status sosioekonomi rendah dengan konsumsi listrik 400 watt. Sebaliknya, karakteristik individu kepala rumah tangga juga tidak berpengaruh terhadap kemungkinan rumah tangga mengalami kerawanan pangan di masa pandemi COVID-19. Karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga juga tidak memiliki hubungan dengan kerawanan pangan rumah tangga di masa pandemi COVID-19.

5.2. Implikasi Kebijakan

Program bantuan sosial dalam bentuk *cash transfer*, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), merupakan instrumen pemerintah yang efektif dalam mengurangi insiden kerawanan pangan pada rumah tangga. Bantuan ini dapat meringankan beban pengeluaran dan menjaga pola konsumsi rumah tangga, sehingga menurunkan risiko kerawanan pangan. Oleh karena itu, program BLT perlu terus dilanjutkan dengan peningkatan besaran bantuan agar masyarakat dapat hidup lebih layak. Namun demikian, mekanisme penyalurannya harus diawasi secara ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta terhindar dari penyalahgunaan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, I. S. (2020). Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 16(2). <https://doi.org/10.37058/jkki.v16i2.2576>.
- Darma, R., Mujahidin, I., & Irawan, A. (2021). The Impact of the Covid-19's Economic Recession on Food Security in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1012, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
- Darma, S. (2020). Food security management for Indonesia: the strategy during the Covid-19 pandemic. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 8(4), 371-381. <https://doi.org/10.2478/mdke-2020-0024>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). [*Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*](#).
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). [*Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021*](#).
- Food and Agriculture Organization. (2020). *Response and Recovery Programme: Global Humanitarian Response Plan: Addressing the impacts of COVID-19 and safeguarding livelihoods in food crisis contexts*. <https://doi.org/10.4060/cb0285en>.
- Food and Agriculture Organization. (2020). *Using the Food Insecurity Experience Scale to monitor the impact of COVID-19*. <https://www.fao.org>.
- Food and Nutrition Technical Assistance. (2007). *Household Food Insecurity Access Scale*. <https://www.fantaproject.org>.
- IFAD. (2020). *Joint Statement by FAO, IFAD, WFP and the World Bank on COVID-19 Impact on Food Security and Nutrition on the occasion of the Extraordinary G20 Agriculture Ministers' Meeting*. <https://www.ifad.org/>. 03 November 2022 (17:50).
- Irfansyah, H., & Rahmawati, F. (2021). Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Selama Pandemi Covid-19 (Studi pada Kelompok Tani Kenanga Mulya Desa Langon). *Ecoplan*, 4(2), 111-121.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020). *Diskon Listrik Sebagai Stimulus Pandemi COVID-19*. <https://www.esdm.go.id/>.
- Kementerian Keuangan (2020). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. <https://pen.kemenkeu.go.id/>.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Global*. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/sosialekonomiglobal>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Program Kartu Prakerja*. <https://www.prakerja.go.id/>.
- Kementerian Sosial (2020). *Jaring Pengaman Sosial Selama Pandemi Covid-19*. <https://kemensos.go.id>.
- [*Kementerian Ketenagakerjaan. \(2020\). Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19.*](#)
- Nurhidayah, L., Djalante, R. (2022). Government Responses to COVID-19 and Their Implications on Food Security in Indonesia. *Springer*, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5074-1_18.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. 28 Juli 2011.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015. *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial*. 14 Desember 2015.
- Purnasari, N., Juwintangtyas, T., & Sabarisman, I. (2020). Household food security during COVID-19 pandemic in Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. *Sustinere: Journal of Environment and Sustainability*, 4(2), 132-143. <https://doi.org/10.22515/sustinere.jesv4i2.118>.
- Rustanto, B. (2014). *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: STKSPRESS.
- Schmidhuber, J., Pound, J., & Qiao, B. (2020). COVID-19: Channels of transmission to food and agriculture. *World Bank* 2020.
- World Bank. (2022). *The Economic Impacts of The COVID-19 crisis*. <https://www.worldbank.org/>.